

**BAB III**  
**SEJARAH OPERASI INTELIJEN**  
**AUSTRALIA – ASIO (*Australian Security Intelligence Organisation*)**  
**DAN KEBIJAKAN KONTRA-TERRORISME AUSTRALIA**

Badan-badan intelijen nasional secara tradisional memainkan peran penting dalam kampanye internasional melawan terorisme, dan mereka telah diharapkan memainkan peran kunci dalam *War on Terror* juga. Namun, peran mereka baru-baru ini telah dipertanyakan. Komunitas intelijen internasional gagal untuk memprediksi jatuhnya Shah Iran tahun 1979, akhir Perang Dingin tahun 1990, runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, kebangkitan fundamentalis Islam dan serangan 11 September 2001.

Bahkan jika badan-badan intelijen telah meramalkan, katakanlah, sebuah serangan yang akan datang, ini tidak menjamin berhasil mencegah hal tersebut terjadi. Pengetahuan tentang apa yang musuh dapat melakukan dan apa yang hendak lakukan adalah tidak pernah cukup untuk menjamin keamanan. Ada juga yang harus menjadi kekuatan dan kemauan untuk menolak. Tidak peduli seberapa baik intelijen tersebut, intelijen saja tidak akan memenangkan sebuah kampanye.<sup>1</sup>

### **3.1 Sejarah Operasi Intelijen Australia – ASIO**

Australia memiliki susunan badan intelijen yang unik. Sama seperti apa yang ada di dalam Konstitusi Australia yang merupakan pengaruh dari Inggris dan Amerika Serikat, beberapa peran dan struktur badan intelijen Australia dipengaruhi oleh kondisi tersebut, tetapi mereka telah berkembang menjadi sebuah model Australia yang unik selama enam puluh tahun terakhir.<sup>2</sup>

Struktur pada saat ini, tanggung jawab dan proses yang dihasilkan oleh AIC (*Australian Intelligence Community*) atau yang disempurnakan oleh dua Komisi Royal yang dilakukan oleh Hakim Hope pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an, melakukan penyelidikan utama ke Dinas Intelijen Rahasia Australia

---

<sup>1</sup> Keith Suter, *All About Terrorism: Everything you were too afraid to ask*, Random House Publisher, Australia, 2008, hal. 250-251.

<sup>2</sup> Philip Flood, *Report of the Inquiry Into Australian Intelligence Agencies*, Chapter 1, Department of Communications, Information Technology and the Arts, Australia, 2004, hal. 4.

(*Australian Secret Intelligence Service/ASIS*) oleh Hakim Samuels dan Michael Codd pada awal tahun 1990-an serta dua tinjauan utama yang dilakukan oleh Sandy Hollway dan Dennis Richardson pada awal dekade yang sama.<sup>3</sup>

Filosofi penting yang mendasari lembaga-lembaga Australia terlibat dalam intelijen internasional dengan sepenuhnya dikeluarkan oleh Hakim Hope dan telah diterima oleh Pemerintahan Hawke, Keating dan Howard. Hasilnya diantaranya adalah:

1. Australia membutuhkan penilaiannya sendiri dan kemampuan pengumpulan intelijen yang kuat dan independen.
2. Penilaian intelijen harus terpisah dari perumusan kebijakan.
3. Fungsi pengumpulan intelijen harus terpisah dari penilaian intelijen, dan pengumpulan Humint (*Human Intelligence*), Sigint (*Signals Intelligence*) harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda.
4. Kantor Penilaian Nasional (*Office of National Assessments/ONA*) sebagai lembaga penilaian utama intelijen luar negeri, harus menikmati kemerdekaan berdasarkan undang-undang.
5. Selain menilai secara terus-menerus, perkembangan internasional sangat penting bagi Australia, ONA harus selalu meninjau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan intelijen internasional yang terlibat oleh Australia.
6. Sehubungan dengan intelijen keamanan, tanggung jawab ASIO, pengumpulan dan penilaian harus terpisah dari penegakan hukum. ASIO juga membutuhkan akses terhadap intelijen yang tersedia di dalam dan di luar Australia.
7. Para menteri juga harus secara aktif terlibat dalam memberikan bimbingan dan pengawasan komunitas intelijen.
8. Seluruh kegiatan-kegiatan intelijen harus dilakukan sesuai dengan hukum Australia.<sup>4</sup>

Dalam sistem intelijen Australia, masing-masing memiliki tiga fungsi pengumpulan yang dilakukan oleh organisasi terpisah, yaitu HUMINT pada *Australian Secret Intelligence Service* (ASIS); SIGINT pada *Defence Signals*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 5.

*Directorate* (DSD); dan *Imagery* pada *Defence Imagery and Geospatial Organisation* (DIGO).<sup>5</sup>

Penilaian atau analisis intelijen merupakan proses menggunakan kecerdasan (*intelligence*), dan informasi lainnya, untuk membentuk suatu gambaran dari sebuah isu atau peristiwa. Dalam sistem Australia, badan-badan penilaian intelijen luar negeri adalah ONA (*Office of National Assessments*) dan DIO (*Defence Intelligence Organisation*). Apa yang membedakan lembaga-lembaga ini dari lainnya adalah siapa yang melakukan analisis merupakan analisis intelijen mereka yang memiliki akses informasi dari seluruh sumber-sumber (sumber rahasia dan sumber terbuka).<sup>6</sup>

Walaupun informasi intelijen sangat penting, dan sering penting untuk penilaian, biasanya ini bukan merupakan sumber informasi utama yang digunakan oleh badan-badan penilaian intelijen. Sumber terbuka-koran, televisi, radio dan internet, dan laporan diplomatik dari Kedutaan Besar Australia, komisi-komisi tinggi dan kantor-kantor konsuler yang memberikan sebagian besar informasi yang tersedia kepada Pemerintah Australia.<sup>7</sup>

Informasi dari sumber-sumber terbuka dan diplomatik secara signifikan lebih murah untuk mengumpulkannya daripada intelijen rahasia. Sumber-sumber umum juga mengandung banyak informasi penting yang dibutuhkan oleh analisis pemerintah. Untuk alasan prinsip dan kepraktisan, sumber-sumber terbuka dan diplomatik harus dimanfaatkan sepenuhnya sebelum informasi itu dicari dari intelijen rahasia. Oleh karena itu, badan-badan intelijen merupakan pengumpul informasi dari pilihan terakhir. Tetapi beberapa informasi tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber terbuka atau laporan diplomatik.<sup>8</sup>

Bahkan negara yang paling demokratis dan terbuka menyimpan beberapa informasi sangat dekat dan aktor-aktor non-negara yang berbahaya biasanya tertutup dalam pemahaman melalui metode-metode pengumpulan terbuka. Dari keseluruhan penilaian, intelijen adalah hanya salah satu dari berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan kebijakan dari pemerintah, dan ini jarang menjadi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

faktor mutlak. Komentator kadang-kadang dapat menganggap penting intelijen sebagai faktor dalam pengambilan keputusan yang gagal untuk mengenali berbagai pertimbangan yang lebih luas, seperti isu-isu strategis, tujuan politik dan ekonomi, hubungan-hubungan aliansi yang bertahan lama, pertimbangan hukum atau kepentingan-kepentingan lain yang dapat menentukan kebijakan.<sup>9</sup>

ASIO (*Australian Security Intelligence Organisation*) didirikan pada tahun 1949 sebagai badan intelijen keamanan nasional Australia. ASIO beroperasi di bawah arahan Direktur Jenderal Keamanan yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.<sup>10</sup>

Peran ASIO adalah untuk mengidentifikasi dan menyelidiki ancaman-ancaman terhadap keamanan, di mana pun mereka muncul, dan memberikan petunjuk untuk melindungi Australia baik warganegaranya maupun kepentingan-kepentingannya. Fungsi-fungsi ASIO ditetapkan dalam *The Australian Security Intelligence Organisation Act 1979 (the ASIO Act)*.<sup>11</sup>

Keamanan didefinisikan dalam *ASIO Act* sebagai spionase, sabotase, kekerasan bermotif politik, kekerasan komunal, serangan terhadap sistem pertahanan Australia, dan tindakan-tindakan terhadap campur tangan asing. Hal ini juga mencakup pelaksanaan tanggung jawab Australia untuk negara asing dalam kaitannya dengan ancaman-ancaman terhadap keamanan dengan fokus khusus pada kekerasan bermotif politik.<sup>12</sup>

ASIO merupakan dinas intelijen keamanan Australia. Tanggung jawab utama kami adalah mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan intelijen tentang ancaman-ancaman terhadap keamanan. *ASIO Act* mendefinisikan keamanan sebagai perlindungan Australia dan masyarakatnya dari spionase, sabotase, kekerasan bermotif politik, kekerasan komunal, serangan terhadap sistem pertahanan Australia, dan tindakan-tindakan campur tangan asing - apakah diarahkan dari, atau dilakukan dalam, Australia atau tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>10</sup> Australian Security Intelligence Organisation, <http://www.asio.gov.au/About-ASIO/Overview.html> diakses 28 Januari 2010 pkl. 17.30 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

ASIO tidak menyelidiki aktivitas protes yang sah atau kegiatan kriminal. ASIO bukanlah badan penegakan hukum dan tidak memiliki kekuasaan penangkapan, tetapi mereka bekerja sama erat dengan badan-badan penegak hukum bila terdapat hubungan kriminal. Investigasi ASIO umumnya berfokus pada mendeteksi tujuan dan kegiatan-kegiatan teroris, orang-orang yang dapat melakukan tindakan kekerasan karena alasan politik dan orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi dapat memperoleh informasi rahasia Australia. Sebagian besar sumber daya ASIO bertujuan untuk mencegah serangan teroris di Australia, melawan kegiatan teroris yang terkait, peringatan ancaman keamanan dan melawan spionase dan campur tangan asing terhadap Australia.<sup>14</sup>

ASIO juga memberikan penilaian keamanan dan melindungi petunjuk keamanan. Penilaian keamanan meliputi, misalnya, orang-orang yang memegang atau mencari kelonggaran keamanan nasional; dalam kasus beberapa pemohon visa, apakah mereka harus diizinkan untuk masuk atau tinggal di Australia; atau akses ke daerah-daerah sensitif, seperti zona-zona terbatas pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Perlindungan petunjuk keamanan tersedia untuk badan-badan pemerintah dan, melalui *Business Liaison Unit*, pemilik infrastruktur dan lainnya di sektor swasta. ASIO juga bertanggung jawab untuk pengumpulan intelijen asing di Australia, atas permintaan Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan.<sup>15</sup>

ASIO memainkan peran penting dalam masyarakat Australia. Visi dari ASIO adalah sebagai garda depan intelijen untuk melindungi Australia. Misinya untuk mengidentifikasi dan menyelidiki ancaman-ancaman keamanan dan memberikan petunjuk untuk melindungi Australia (masyarakat dan kepentingan-kepentingannya).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

**Tabel 3.1 Nilai-nilai ASIO**

<p><b>Excellence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ producing high quality, relevant and timely advice</li> <li>▪ displaying strong leadership and professionalism</li> <li>▪ improving through innovation and learning</li> </ul>	<p><b>Integrity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ being ethical and working without bias</li> <li>▪ maintaining the confidentiality and security of our work</li> <li>▪ respecting others and valuing diversity</li> </ul>
<p><b>Cooperation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ building a common sense of purpose and mutual support</li> <li>▪ using appropriate communication in all our relationships</li> <li>▪ fostering and maintaining productive partnerships</li> </ul>	<p><b>Accountability</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ being responsible for what we do and for our outcomes</li> <li>▪ being accountable to the Australian community through the Government and the Parliament</li> </ul>

**Sumber:** Australian Security Intelligence Organisation dalam website <http://www.asio.gov.au/About-ASIO/Mission-and-Values.html> diakses 28 Januari 2010 pukul 18.00 WIB.

ASIO beroperasi dalam pengawasan ketat khususnya dan kerangka akuntabilitas, suatu mekanisme yang mendukung kinerja ASIO dalam undang-undang yang relevan dalam menjalankan peran dan fungsinya. ASIO beroperasi di bawah kendali Direktur Jenderal Keamanan yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.<sup>17</sup>

Unsur-unsur kunci kerangka kerja ini meliputi:

- Laporan Tahunan yang sangat diklasifikasikan, yang diberikan kepada anggota-anggota Kabinet Komite Keamanan Nasional dan Pemimpin Oposisi;
- Sebuah Laporan *unclassified* untuk Parlemen (*Report to Parliament*) yang tersedia secara publik;
- Inspektur Jenderal Intelijen dan Keamanan;
- Parlemen Bersama Komite Intelijen dan Keamanan dan Komite Parlemen lainnya, termasuk Senat Tetap Komite Hukum dan Urusan Konstitusi;

<sup>17</sup> *Ibid.*

- Divisi Keamanan Banding dari Pengadilan Banding Administrasi; dan
- Pedoman Jaksa Agung untuk mengatur ASIO menangani aspek-aspek kerja Jaksa Agung.

Fungsi-fungsi dan kekuasaan ASIO ditentukan oleh Parlemen Australia dan diatur dalam undang-undang. Kerangka kerja ini menyediakan jaminan kepada Pemerintah, Parlemen dan masyarakat Australia yang beroperasi secara ketat dalam kerangka kerja legislatif dalam melaksanakan peran dan fungsinya.<sup>18</sup>

ASIO adalah satu-satunya agen dalam komunitas intelijen Australia yang berwenang dalam rangka tugas rutin untuk melakukan investigasi ke dalam, dan mengumpulkan intelijen kegiatan warga Australia, yang mana beroperasi dalam pengawasan ketat khususnya dan kerangka akuntabilitas. Landasan kerangka kerja ini adalah Undang-Undang ASIO (*ASIO Act*), yang telah dibuat untuk memastikan adanya keseimbangan yang tepat di antara hak-hak individu dan hak kolektif masyarakat untuk keamanan.<sup>19</sup>

Bagian-bagian kunci perundang-undangan yang mengatur peran dan fungsi serta penggunaan kekuasaan khusus meliputi:

- The *Australian Security Intelligence Organisation Act 1979*
- The *Telecommunications (Interception and Access) Act 1979*
- The *Intelligence Services Act 2001*<sup>20</sup>

Peran dan tanggung jawab ASIO ditetapkan dalam *Australian Security Intelligence Organisation Act 1979 (ASIO Act)*. Fungsi utama ASIO adalah untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan intelijen keamanan. Undang-undang ASIO mendefinisikan 'keamanan' sebagai perlindungan Australia, rakyatnya dan kepentingan-kepentingan terhadap:

- Spionase;
- Sabotase,
- Kekerasan bermotif politik/*Politically motivated violence (PMV)*;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

- Kekerasan komunal;
- Serangan-serangan terhadap sistem pertahanan Australia; atau
- Tindakan campur tangan asing.<sup>21</sup>

Undang-undang ASIO memperluas tanggung jawab ASIO untuk intelijen keamanan di luar perbatasan Australia. Undang-undang ASIO juga termasuk, dalam definisi keamanan, kewajiban-kewajiban keamanan Australia bagi negara-negara lain.<sup>22</sup>

Dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi Australia, rakyatnya dan kepentingan-kepentingan, ASIO:

- Mengumpulkan intelijen melalui berbagai cara, termasuk sumber-sumber manusia dan operasional teknis, dengan menggunakan sarana yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung;
- Menilai intelijen dan memberikan nasihat kepada Pemerintah dan seterusnya mengenai hal-hal keamanan;
- Menyelidiki dan merespon ancaman-ancaman terhadap keamanan;
- Mempertahankan kemampuan kontra-terorisme nasional; dan
- Memberikan penilaian keamanan, termasuk pemeriksaan visa masuk dan sebagai akses ke materi yang diklasifikasikan dan yang ditunjuk sebagai kawasan keamanan yang dikendalikan.<sup>23</sup>

Menurut Undang-undang ASIO dan undang-undang lainnya, ASIO dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekuasaan khusus di bawah surat perintah, termasuk wewenang untuk menyadap telekomunikasi, dan memaksa orang untuk muncul sebelum kewenangan ditentukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah terorisme. ASIO juga memiliki kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk membantu operasi-operasi intelijen dan merespon peristiwa.<sup>24</sup>

Undang-undang ASIO juga memberikan fungsi ASIO untuk memberikan perlindungan nasihat keamanan kepada pemerintah. ASIO bertanggung jawab

<sup>21</sup> ASIO Report to Parliament 2008-09, Commonwealth of Australia, 2009, hal. ix.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*



untuk mengumpulkan intelijen luar negeri di Australia di bawah surat perintah atas permintaan Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan, dan bekerjasama dengan *Australian Secret Intelligence Service (ASIS)* atau *Defence Signals Directorate (DSD)*.<sup>25</sup>

ASIO adalah satu-satunya badan dalam komunitas intelijen Australia yang berwenang dalam rangka tugas rutin untuk melakukan investigasi ke dalam, dan mengumpulkan intelijen kegiatan-kegiatan warga Australia, mereka beroperasi dalam pengawasan ketat khususnya dan kerangka kerja akuntabilitas. Landasan kerangka kerja ini adalah Undang-undang ASIO (*ASIO Act*), yang telah dibuat untuk memastikan adanya keseimbangan yang tepat antara hak-hak individu dan hak kolektif masyarakat terhadap keamanan. Inspektur Jenderal Intelijen dan Keamanan – otoritas resmi yang independen juga memainkan peranan penting dalam mengawasi kegiatan-kegiatan ASIO.<sup>26</sup>

Sistem intelijen Australia menawarkan kesempatan terbaik untuk mendeteksi aktivitas terorisme dan memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan. Bertukar informasi dan penilaian intelijen dengan mitra Australia dapat membantu mengidentifikasi dan memonitor teroris, memberikan peringatan dan mengganggu kegiatan mereka. Dari perspektif penegakan hukum, intelijen yang baik merupakan bagian utuh dalam melakukan penyelidikan yang efektif berkaitan dengan terorisme. Kegiatan intelijen Australia dan badan-badan keamanan telah membantu menggagalkan serangan teroris dan, investigasi Bom Bali menunjukkan, menemukan link teroris dan asosiasi yang sebelumnya tidak dikenal.<sup>27</sup>

Sejak tanggal 11 September 2001, intelijen Australia dan badan-badan keamanan telah mempertajam fokus mereka pada terorisme. *The Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)* dan *the Australian Secret Intelligence Service (ASIS)* telah menerima sumber daya baru yang signifikan dan telah memperdalam link yang ada dan memimpin hubungan baru di kawasan regional. Hal ini telah menyebabkan lebih besar penyatuan sumber daya dan peningkatan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. x.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dramatis dalam berbagi informasi. Mereka juga menyediakan pelatihan intelijen kontra-terorisme dan advis kepada negara-negara di Pasifik.<sup>28</sup>

*The Defence Intelligence Organisation* (DIO) telah meningkatkan sumber daya analitis kontra-terorisme sedangkan *Defence Signals Directorate* (DSD) telah meningkatkan kemampuannya untuk mengumpulkan intelijen sinyal terhadap teroris. *The Defence Imagery and Geospatial Organisation* (DIGO) juga mengelola kapabilitas kontra-terorisme.<sup>29</sup>

### 3.2 Ancaman-ancaman Terorisme di Australia

#### Australia – Sasaran Teroris

Australia adalah sasaran teroris, baik sebagai bangsa Barat dan dalam dirinya sendiri. Intelijen mengkonfirmasi bahwa kami adalah sasaran sebelum serangan 11 September 2001, dan kami masih menjadi sasaran. Kepentingan Australia baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sasaran teroris.<sup>30</sup> Pemimpin-pemimpin Al Qaida sering mengancam di depan umum, mereka menyatakan ancamannya yang seringkali menyesatkan, tetapi maksud mereka jelas.<sup>31</sup>

Sebelum 11 September 2001, Osama bin Laden menghubungkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yaitu menyebutkan Israel dan Inggris dengan nama. Sejak itu, bin Laden telah lebih jelas mengidentifikasi negara-negara tersebut yang ia anggap sebagai 'sekutu'. Australia telah dimaksud di dalam enam pernyataan terpisah yang dikeluarkan oleh bin Laden sendiri atau wakilnya, Ayman al-Zawahiri:

- On 3 November 2001, Bin Laden said:

*The Crusader Australian forces were on the Indonesia shores ... they landed to separate East Timor, which is part of the Islamic world.*

- In an interview released in mid-November 2001 concerning the war in Afghanistan, Bin Laden said:

*In this fighting between Islam and the Crusaders, we will continue our jihad. We will incite the nation for jihad until we meet God and get his blessing. Any country that supports the Jews can only blame itself ... what do Japan or*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Transnational Terrorism: The Threat to Australia, Commonwealth of Australia, 2004, hal. 83.

<sup>31</sup> *Ibid.*

*Australia or Germany have to do with this war? They just support the infidels and the Crusaders.*

- Bin Laden made further reference to Australia in a videotape released in the United Kingdom in May 2002 in which he said:

*What has Australia in the extreme south got to do with the oppression of our brothers in Afghanistan and Palestine?*

- On 12 November 2002, Bin Laden made a statement that gave more prominence to Australia than any other non-US Western country and reaffirmed Australia as a terrorist target:

*We warned Australia before not to join in [the war] in Afghanistan, and [against] its despicable effort to separate East Timor. It ignored the warning until it woke up to the sounds of explosions in Bali. Its government falsely claimed that they were not targeted.*

- On 21 May 2003, in an audiotape, Ayman al-Zawahiri said:

*O Muslims, take matters firmly against the embassies of America, England, Australia, Norway and their interests, companies and employees.*

- On 18 October 2003, in an audio message addressed to the American people concerning the war in Iraq, Bin Laden stated that:

*We maintain our right to reply, at the appropriate time and place, to all the states that are taking part in this unjust war, particularly Britain, Spain, Australia, Poland, Japan and Italy.<sup>32</sup>*

Artinya,

- Pada tanggal 3 November 2001, Bin Laden berkata:  
Pasukan Tentara Salib Australia berada di Pantai Indonesia ... mereka mendarat untuk memisahkan Timor Timur, yang merupakan bagian dari dunia Islam.
- Dalam sebuah wawancara yang dirilis pada pertengahan bulan November 2001 tentang perang di Afghanistan, Bin Laden berkata:  
Dalam pertempuran antara Islam dan Tentara Salib, kami akan melanjutkan jihad. Kami akan menghasut bangsa untuk jihad sampai kita bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan berkat-Nya. Negara manapun yang mendukung orang-orang Yahudi hanya bisa menyalahkan diri sendiri ... apa yang dilakukan Jepang atau Australia atau Jerman yang harus dilakukan dengan perang ini? Mereka hanya mendukung orang-orang kafir dan Tentara Salib.
- Bin Laden membuat lebih lanjut referensi terhadap Australia dalam sebuah rekaman video yang dirilis di Inggris pada bulan Mei 2002 di mana ia berkata:  
Apa yang telah Australia lakukan di ujung selatan sehubungan dengan penindasan terhadap saudara-saudara kita di Afghanistan dan Palestina?
- Pada tanggal 12 November 2002, Bin Laden membuat pernyataan yang lebih menonjol kepada Australia daripada negara Barat non-US dan menegaskan kembali Australia sebagai sasaran teroris:  
Kami memperingatkan Australia sebelum tidak bergabung dalam [perang] di Afghanistan, dan [melawan] dengan upaya keji untuk memisahkan Timor Timur. Mengabaikan peringatan sampai terbangun oleh suara

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

ledakan di Bali. Pemerintahnya palsu mengklaim bahwa mereka tidak ditargetkan.

- Pada tanggal 21 Mei 2003, dalam sebuah kaset, Ayman al-Zawahiri mengatakan:  
Wahai umat Islam, mengambil tindakan tegas terhadap Kedutaan Besar Amerika, Inggris, Australia, Norwegia dan kepentingan mereka, perusahaan dan karyawan.
- Pada tanggal 18 Oktober 2003, dalam pesan audio yang ditujukan kepada rakyat Amerika mengenai perang di Irak, Bin Laden menyatakan bahwa:  
Kami mempertahankan hak kami untuk membalas, pada waktu dan tempat yang tepat, untuk semua negara yang telah mengambil bagian dalam perang tidak adil ini, khususnya Britania Raya, Spanyol, Australia, Polandia, Jepang dan Italia.

Lingkungan keamanan Australia telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2002 dan 2005 Bom Bali dan serangan terhadap Kedutaan Australia di Jakarta pada tahun 2004 telah menandakan sebagai peringatan bahwa Australia menghadapi ancaman-ancaman teror regional. Serangan teroris di London dan Madrid menggambarkan tidak hanya ancaman untuk warga negara Australia secara internasional tetapi menyoroti kemungkinan serangan di Australia.<sup>33</sup>

Respon Australia terhadap ancaman terorisme melibatkan setiap tingkatan pemerintahan. Pendekatan ini berasal dari pemahaman bahwa keamanan nasional bukan hanya masalah kebijakan. Para teroris mengandalkan kejutan untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan ancaman yang terus berubah.<sup>34</sup>

Respons Australia untuk terorisme menggabungkan penciptaan hukum yang efektif dan pengumpulan intelijen, dengan pertahanan nasional, penegakan hukum, keamanan maritim dan penerbangan, pengawasan perbatasan, keamanan protektif, tindakan pencegahan kesehatan, tanggap darurat dan konsekuensi pengelolaan, perlindungan infrastruktur masyarakat dan swasta, perencanaan dan pengujian respon, serta meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> National Security and Counter-Terrorism,  
[http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/National\\_security](http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/National_security) diakses 4 Februari 2010 pkl.  
22.00 WIB.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Terorisme tetap menjadi ancaman serius bagi Australia, dan strategi kontra-terorisme Australia terus ditingkatkan untuk mengatasi lingkungan keamanan. Selama lima tahun terakhir, Australia dengan kritis meninjau pengaturan keamanan nasionalnya dan memperkenalkan berbagai langkah-langkah penting dan reformasi. Tujuan kontra-terorisme pertahanan Australia adalah untuk melindungi warga Australia dan kepentingan-kepentingan Australia. Pemerintah Australia berupaya untuk mencapai ini dengan:

- bekerja dengan negara, wilayah dan pemerintah lokal, swasta dan masyarakat untuk membangun kemampuan kontra-terorisme nasional yang efektif; dan
- berkontribusi terhadap upaya-upaya kontra-terorisme regional dan internasional yang lebih luas.<sup>36</sup>

Untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip kontra-terorisme, strategi kontra-terorisme Pemerintah Australia didasarkan pada pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparedness*), respon (*response*) dan pemulihan (*recovery*).<sup>37</sup>

### **3.3 Kebijakan Kontra-Terrorisme Australia**

Intelijen telah mengambil signifikansi lebih besar dalam perang melawan terorisme. Hal ini ada di garis depan pertahanan Australia dan salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari serangan teroris. Ini adalah komponen kunci dari aliansi keamanan internasional Australia dan kemitraan, terutama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pemerintah telah mendorong pendanaan untuk intelijen Australia dan badan keamanan untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijen mereka. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga ini akan terus memperkuat hubungan dengan mitra mereka di luar negeri. Hal ini akan meningkatkan arus intelijen pada kelompok-kelompok ekstremis yang mungkin mengancam kepentingan-kepentingan Australia dan memberikan kontribusi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

kepada kampanye internasional yang lebih luas melawan terorisme.<sup>38</sup>

Memerangi terorisme memerlukan lembaga-lembaga pemerintah dalam jumlah yang lebih besar dan berbagai fungsi yang lebih luas. Polisi, intelijen, bea cukai, angkatan pertahanan, imigrasi dan lembaga-lembaga transportasi, serta hukum Australia, kerjasama pembangunan dan keuangan memainkan peran penting dalam mendukung upaya kontra-terorisme internasional Australia. Koordinasi kegiatan badan-badan ini sangat penting untuk mencapai seluruh pendekatan pemerintah untuk memerangi terorisme.<sup>39</sup>

Diplomasi juga memainkan peranan sentral. Mengembangkan jaringan di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan telah berperan dalam membentuk ikatan kuat dengan negara-negara regional untuk memerangi terorisme. Hal ini juga telah aktif dalam mendorong respon tegas terhadap kontra-terorisme di tingkat regional dan global dan dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi kontra-terorisme internasional Australia.<sup>40</sup>

Duta Besar Kontra-Terrorisme Australia berfokus pada advokasi internasional dan keterlibatan Australia dalam memperluas hubungan-hubungan badan operasional dengan negara-negara mitra mereka. Kegiatan-kegiatan ini, dan kontribusinya berguna untuk pembangunan kapasitas regional, yang dikoordinasikan melalui mekanisme antar-lembaga baru – Grup Koordinasi Kontra-Terrorisme internasional.<sup>41</sup>

Australia sangat mendukung tugas PBB dalam memerangi terorisme. Dalam hubungannya dengan para mitra dan sekutu Australia, mereka telah menggunakan PBB secara efektif untuk membangun dukungan internasional dan memperkuat kerangka hukum internasional untuk melawan ancaman terorisme internasional. Bidang utama dari resolusi Dewan Keamanan PBB meliputi bidang-bidang seperti pembekuan asset-aset teroris, daftar organisasi-organisasi teroris, dan kontrol pada kemampuan proliferasi CBRN, merupakan prestasi aliansi yang penting.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Transnational Terrorism: The Threat to Australia, *Op.cit.*, hal. 95.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 98.

Australia mendukung tugas Komite Kontra-Terrorisme PBB (*UN's Counter-Terrorism Committee/CTC*) yang didirikan berdasarkan Resolusi 1373. Pelaksanaan Resolusi 1373 dilakukan secara global, namun termasuk di kawasan Asia Pasifik tidak merata. Banyak negara masih relatif lemah pada kemampuan kontra-terorisasinya. Langkah-langkah baru untuk memperkuat kapasitas CTC agar dapat lebih fokus kepada negara-negara ini harus menghasilkan beberapa kemajuan. Australia telah mendukung sejumlah kegiatan-kegiatan kontra-terorisasi di wilayah Asia Pasifik yang terdapat di dalam kewajiban Resolusi 1373.<sup>43</sup>

Australia telah berperan penting dalam Jemaah Islamiyah (JI) yang terdaftar oleh PBB sebagai organisasi teroris di bawah Resolusi Dewan Keamanan 1267. Daftar ini mengharuskan seluruh anggota PBB untuk membekukan aset-aset Jemaah Islamiyah dan membatasi gerakan para anggotanya. Lebih dari 20 anggota Jemaah Islamiyah juga telah terdaftar dengan nama oleh PBB dan pemerintah Australia telah mencatatkan individu-individu tersebut berdasarkan Hukum Australia.<sup>44</sup>

Pemerintah Australia mendukung daftar lanjutan Al-Qaida dan Taliban – terkait dengan entitas dan individu pada Komite Sanksi 1267 Dewan Keamanan PBB. Daftar konsolidasi Komite mewakili suatu sarana penting dalam penerapan sanksi-sanksi internasional dan mereka mendorong negara-negara menggunakannya untuk bertindak keras terhadap kelompok-kelompok teroris.<sup>45</sup>

Australia adalah pihak ke-11 dari Konvensi Anti-Terrorisme PBB-12 dan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menjadi pihak yang tersisa sebagai masalah prioritas. Pemerintah Australia terus mendesak negara-negara di wilayahnya untuk meratifikasi atau menyetujui konvensi ini. Australia mendukung kegiatan ini untuk menerapkan dan menggunakannya guna meningkatkan standar-standar internasional di bidang ini. Australia juga memainkan peran penting selama beberapa tahun untuk memandu negosiasi di PBB pada Konvensi Komprehensif tentang Terorisasi (*Comprehensive*

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

*Convention on Terrorism*), menunjukkan keinginannya untuk terlibat dengan lainnya dalam mencari standar yang sama dan bersama-sama bersepakat dalam melaksanakan kewajiban.<sup>46</sup>

Memblokir aliran-aliran dana organisasi-organisasi teroris merupakan unsur kunci dalam kampanye global melawan terorisme. Hal ini juga menjadi semakin sulit karena anggaran rendah terorisme dan bentuk-bentuk baru dan inovatif dari penggalangan dana membuat terorisme cepat bergerak. Pekerjaan yang dilakukan adalah dengan membuat badan amal sebagai sumber pendanaan teroris – yang lebih bertanggung jawab, tetapi ada indikasi bahwa dana-dana teroris sekarang berasal dari sumber-sumber komersial, perdagangan narkoba dan penculikan.<sup>47</sup>

Australia memainkan peran aktif dalam badan-badan internasional yang terlibat dalam tugas pendanaan anti-teroris, termasuk *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *Financial Action Task Force* (FATF) dan *the Egmont Group of Financial Intelligence Units*. Melalui Institut Pelatihan IMF di Singapura, Australia membantu memberikan pelatihan kepada para jaksa, hakim dan pejabat dari unit-unit intelijen keuangan dari kawasan Asia Pasifik yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan pendanaan anti-teroris dan undang-undang anti-pencucian uang. Mereka juga membantu negara-negara memenuhi standar-standar global FATF yang terkait dengan anti-pencucian uang dan pendanaan anti-teroris, melalui bantuan pembangunan kapasitas bilateral dan partisipasi dalam program-program evaluasi bersama.<sup>48</sup>

Sejak terjadinya serangan 11 September 2001 dan pemboman kereta api di Madrid, keamanan transportasi penting untuk diperbaharui kembali. Dalam ICAO dan IMO, Australia telah memiliki sikap untuk menganjurkan penerapan standar-standar dan praktek keamanan transportasi lebih kuat. Australia juga memberikan kontribusi perannya di *World Customs Organisation* dalam mengamankan pergerakan barang-barang lintas batas.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 100.

<sup>49</sup> *Ibid.*



Peran Australia sebagai pemain global dalam kampanye melawan terorisme tercermin dalam keikutsertaannya dalam pertemuan G8 *Counter-Terrorism Action Group* (CTAG) yang didirikan pada tahun 2003. CTAG merupakan forum yang berguna bagi pertukaran informasi antara negara-negara donor utama di dunia tentang kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas kontra-terorisme. Australia menggunakan CTAG untuk menyoroti kebutuhan-kebutuhan khusus kontra-terorisme dan kerentanan negara-negara di wilayah Australia.<sup>50</sup>

Sebuah penetapan kontra-terorisme bilateral melancarkan jalan bagi kerjasama praktis di antara badan-badan Australia dan mitra regional mereka. Penetapan telah ditandatangani dengan Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, India, Fiji, Papua Nugini dan Timor Timur. Penetapan ini membantu mendukung hubungan-hubungan keamanan dan intelijen semakin produktif serta langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan kontra-terorisme.<sup>51</sup> Sejumlah badan-badan Pemerintah Australia juga menandatangani perjanjian kerjasama langsung dengan mitra-mitra mereka. Keamanan Australia, intelijen dan hubungan pertahanan dengan Singapura juga telah terlibat dalam merespon ancaman terorisme baru.<sup>52</sup>

Pemerintah berkomitmen dalam aksi nyata untuk memerangi terorisme. Mereka akan terus memastikan bahwa badan-badan merupakan sumber daya yang tepat, yang merespon dengan cerdas serta dapat mengubah ancaman, dan bahwa semua tindakan praktis dan yang diperlukan diambil untuk melindungi Australia dan warga Australia.<sup>53</sup>

Kebijakan yang diuraikan dalam Buku Putih ini memberikan sebuah pendekatan efektif dan seimbang yang memperkuat lebih lanjut upaya-upaya *counter-terrorism* domestik Australia dan membuat kontribusi yang kuat bagi upaya-upaya kontra-terorisme internasional.<sup>54</sup>

Pemerintah telah membuat sejumlah perubahan-perubahan penting

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

mengenai cara tanggapan Australia terhadap terorisme. Buku Putih ini menetapkan pendekatan pemerintah untuk memperkuat keamanan penerbangan, dan meningkatkan koordinasi upaya-upaya kontra-terorisme kami. Hal ini juga menetapkan untuk pertama kalinya suatu strategi untuk melawan kekerasan ekstremisme di Australia.<sup>55</sup>

Pemerintah telah mengambil dan akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memerangi terorisme dan mereka yang merencanakan atau melakukan tindakan seperti itu. Buku Putih (*White Paper*) ini menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk memberikan sumber daya yang diperlukan bagi penegakan hukum di Australia, intelijen, keamanan dan lembaga-lembaga perlindungan perbatasan untuk mengaktifkan mereka beroperasi secara efektif. Pada saat yang sama, mereka juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Australia menanggapi terorisme tidak melakukan dengan sengaja merusak prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi.<sup>56</sup>

Pemerintah tidak dapat menjamin bahwa Australia akan bebas dari ancaman serangan teroris. Tetapi pemerintah ini dapat menjamin bahwa akan mengambil semua yang diperlukan dan langkah-langkah praktis untuk memerangi ancaman. Buku Putih (*Counter-Terrorism White Paper: Securing Australia, Protecting Our Community*) ini merupakan bagian dari agenda reformasi keamanan nasional pemerintah Australia. Ini adalah langkah lebih lanjut untuk memberikan rasa yang lebih aman, Australia lebih aman.<sup>57</sup>

Tanggung jawab pertama adalah perlindungan pemerintah Australia, masyarakat Australia dan kepentingan Australia. Jadi kunci prioritas pemerintah adalah untuk melindungi Australia dari terorisme. Ancaman terorisme ke Australia adalah nyata dan abadi. Hal ini telah menjadi sifat yang tetap dan permanen dari lingkungan keamanan Australia.<sup>58</sup>

Sumber utama terorisme internasional dan ancaman utama teroris ke Australia dan kepentingan-kepentingan Australia adalah dari gerakan kekerasan global Jihad – ekstremis yang mengikuti penafsiran militan Islam dan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. ii.

menyimpang yang mendukung kekerasan sebagai jawaban atas keluhan-keluhan yang dirasakan. Gerakan ekstremis ini terdiri dari Al Qaeda, kelompok sejenis atau yang terkait dengannya, dan lain-lain yang terinspirasi oleh pandangan dunia yang sama.<sup>59</sup>

Sementara ancaman ini terus-menerus, tantangan telah berkembang sejak terakhir adanya *Counter-Terrorism White Paper* pada tahun 2004 dalam dua hal.

Pertama, meskipun sudah ada kesuksesan kontra-terorisme (terutama tekanan terhadap kepemimpinan inti Al-Qaeda di Afghanistan dan Pakistan, dan tindakan melawan teroris-teroris di Asia Tenggara), keberhasilan ini telah diimbangi oleh munculnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan, atau diilhami oleh metode-metode dan pesan Al-Qaeda, dengan daerah-daerah baru seperti Somalia dan Yaman bergabung dengan daerah-daerah yang berhubungan di Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah dan Teluk.<sup>60</sup>

Perubahan kedua jelas sejak tahun 2004 telah ada peningkatan ancaman teroris dari orang yang lahir atau dibesarkan di Australia, yang sudah dipengaruhi oleh kekerasan pesan Jihad. Pengeboman di London pada tanggal 7 Juli 2005, yang dilakukan oleh warga negara Inggris, menjadi suatu ancaman nyata secara global dan juga menimbulkan serangan secara lokal di negara demokrasi Barat, termasuk Australia.<sup>61</sup>

Sejumlah warga Australia dikenal untuk berlangganan pesan ini, beberapa di antaranya mungkin akan dipersiapkan untuk terlibat kekerasan. Banyak dari orang-orang ini lahir di Australia dan mereka datang dari berbagai latar belakang etnis. Kelompok dari mereka yang berkomitmen untuk melakukan kekerasan tindakan ekstremis di Australia adalah tidak statis - dari waktu ke waktu beberapa menjauh dari tindakan ekstremis sementara yang lain menjadi ekstrem.<sup>62</sup>

Pemerintah telah melihat perencanaan teroris di Australia. Sejak tahun 2001, sejumlah serangan teroris telah digagalkan di Australia. Tiga puluh delapan orang telah dituntut atau sedang dituntut sebagai akibat dari operasi-operasi kontra-terorisme dan 20 orang telah dihukum karena kejahatan terorisme di bawah

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

KUHP. Lebih dari 40 warga Australia memiliki paspor yang dicabut atau permohonannya ditolak karena alasan-alasan yang berhubungan dengan terorisme.<sup>63</sup>

Strategi kontra-terorisme pemerintah diinformasikan oleh sejumlah penilaian-penilaian inti. Mereka harus mengambil pendekatan yang komprehensif dan berlapis. Tindakan kontra-terorisme ini harus diinformasikan oleh penilaian-penilaian strategis tentang sifat ancaman dan kerentanan Australia terhadap itu. Dan mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan cara memanfaatkan kemampuannya, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan meringankan risiko serangan atau kegagalan dalam merespon.<sup>64</sup>

Strategi memiliki empat unsur kunci:

1. Analisis: intelijen memimpin respon terhadap terorisme yang didorong oleh suatu komunitas keamanan nasional yang tepat.
2. Perlindungan: mengambil semua tindakan penting dan praktis untuk melindungi Australia dan warga Australia dari terorisme di dalam negeri dan di luar negeri.
3. Respon: menyediakan respon langsung dan yang ditargetkan terhadap ancaman-ancaman teroris khusus dan serangan-serangan teroris yang seharusnya terjadi.
4. Ketahanan: membangun komunitas warga Australia yang kuat dan tangguh untuk melawan perkembangan bentuk kekerasan ekstremisme dan terorisme di garda depan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. iii.